

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara tentu ingin mewujudkan cita-citanya secara adil dan merata untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu “...*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia...*”. Salah satu aspek dalam mencapai kesejahteraan umum yakni meningkatkan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran merupakan istilah bagi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, serta bekerja kurang dari dua hari seminggu.

Secara teoritis, pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, dimana penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya, hal ini kemudian menimbulkan kesalahan alokasi tenaga kerja yang mengakibatkan tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan dan sehingga akan menganggur (Sembiring & Sasongko, 2019). Menurut Sukirno (2006) pengangguran memiliki efek buruk bagi perekonomian masyarakat pada suatu negara.

Perkembangan perekonomian di negara-negara maju, pengangguran biasanya diakibatkan dari pasang surutnya ekonomi dan bisnis. Berbeda dengan negara maju, pengangguran di negara berkembang lebih diakibatkan karena kurangnya investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, jumlah penduduk

yang meningkat, hingga kurangnya kualitas sumberdaya manusia. Pada negara berkembang, meningkatnya pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan serius yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi (Dainty *et al.*, 2020). Seperti halnya dinegara berkembang lain, masalah pengangguran juga terjadi di negara Indonesia. Menurut laporan BPS pada bulan Februari 2022 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,83 persen atau 8,4 juta jiwa dari total angkatan kerja berjumlah 144,04 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan akan berkurang.

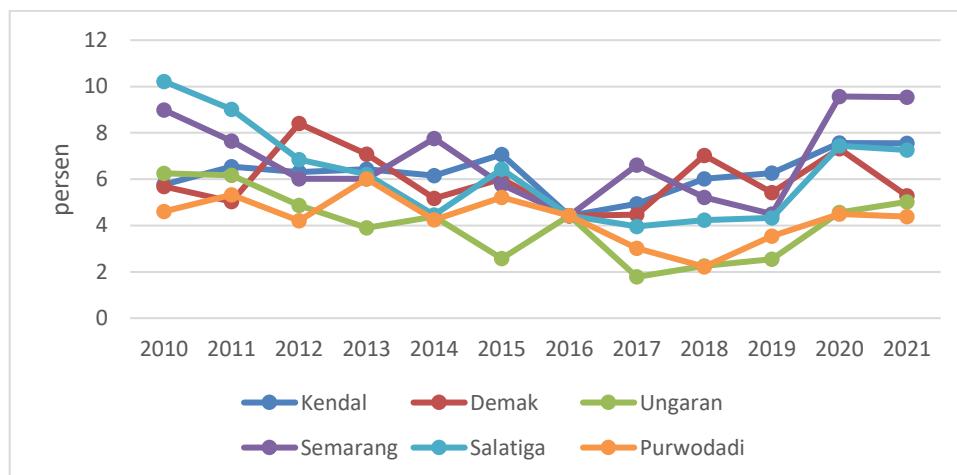
Pengangguran menjadi faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi yang harus mendapatkan perhatian. Akibat dari adanya pengangguran, masyarakat menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika persoalan pengangguran tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya angka putus sekolah, terjadinya kesenjangan pendapatan hingga permasalahan sosial lainnya. Berbagai macam masalah tersebut merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan sosial, moralitas, hingga dapat merendahkan martabat manusia.

Kawasan Kedungsepur merupakan salah satu kawasan pusat kegiatan nasional yang ada di provinsi Jawa Tengah yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Kawasan ini merupakan salah satu hasil dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

Selain itu kawasan Kedungsepur pada tahun 2022 menjadi kawasan strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Penetapan ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Kawasan ini meliputi kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan).

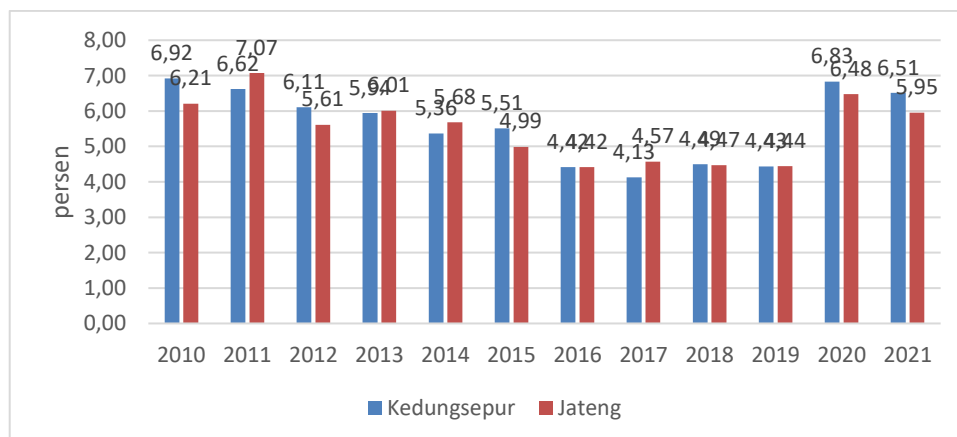
Penetapan kawasan Kedungsepur bertujuan untuk mewujudkan perkotaan yang sebagai pusat ekonomi berskala internasional. Basis dari kawasan ini yaitu industri, perdagangan barang dan jasa, industri maritim dan jasa maritim, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sumberdaya kelautan. Selain itu penetapan kawasan ini berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 1.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021

Sumber: BPS Jawa Tengah (2023), diolah.

Gambar 1.1 dapat diuraikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan Kedungsepur mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka terbesar terjadi di Kota Salatiga sebesar 10.22%. Sedangkan tingkat pengangguran terkecil terjadi di Kabupaten Grobogan sebesar 4.6%. Tingkat pengangguran terbuka di kawasan tersebut memiliki perbedaan yang cukup jauh. Kota Semarang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang mencapai rata-rata 6.84% atau tertinggi dalam kawasan Kedungsepur. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka terkecil yaitu di Kabupaten Semarang yaitu hanya 4.06%. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran di kawasan Kedungsepur masih diatas tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021

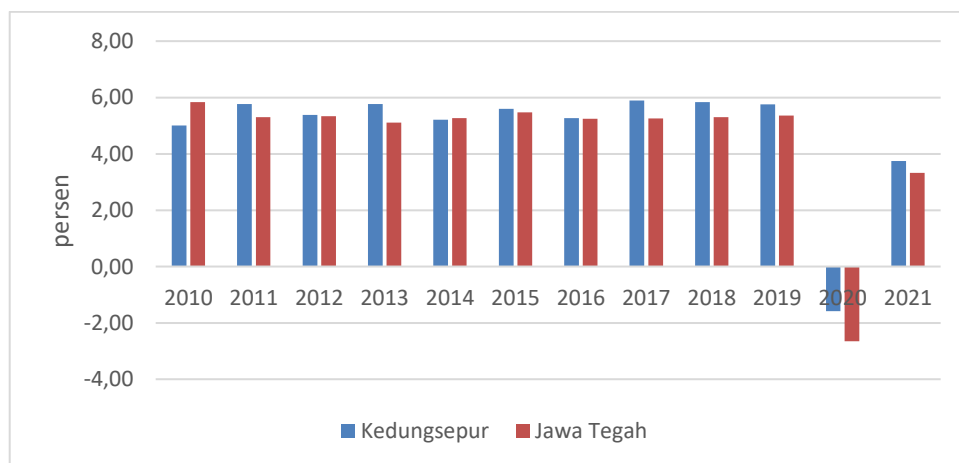
Sumber: BPS Jawa Tengah (2023), diolah.

Gambar 1.2 menjelaskan bahwasanya tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 tingkat pengangguran di kawasan Kedungsepur sebesar 6.92% atau lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6,21%. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran di kawasan Kedungsepur lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah. Secara umum rata-

rata tingkat pengangguran di kawasan Kedungsepur tergolong masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah.

Usaha yang bisa digunakan untuk meminimalisir tingkat pengangguran diantaranya yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan bertahap dalam jangka panjang dengan meningkatkan tabungan, produksi, dan modal untuk meningkatkan output, baik peningkatan output lebih besar atau lebih kecil daripada peningkatan jumlah penduduk. (Amalia, 2015). Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad (1999) yaitu kenaikan pendapatan nasional bruto atau produk domestik bruto tanpa melihat lebih kecil atau besar dari jumlah kenaikan pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa ada suatu kegiatan perekonomian dikarenakan peningkatan produksi barang dan jasa yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang biasanya dilihat melalui produk domestik bruto. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan *output*, maka perlu dibutuhkan banyak tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja (Arsyad, 2010).



Gambar 1.3 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021

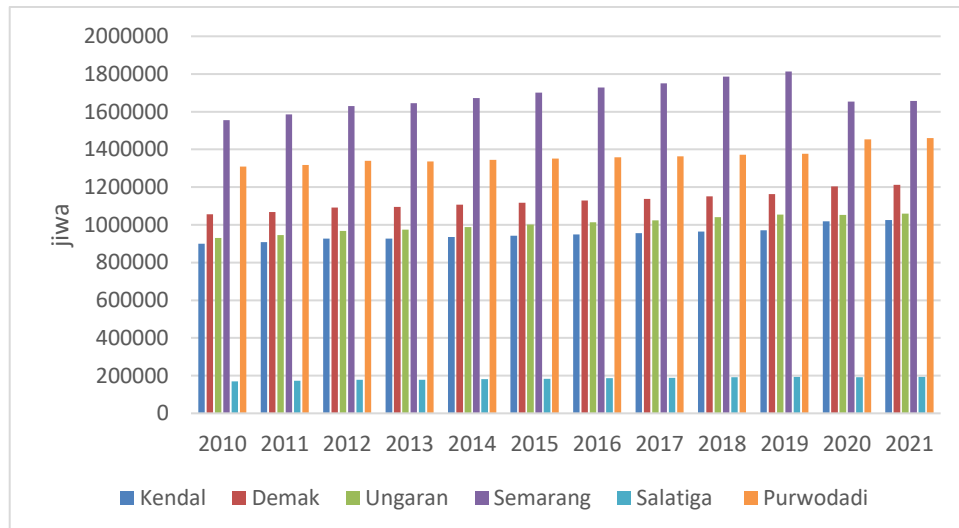
Sumber: BPS Jawa Tengah (2023), diolah.

Gambar 1.3 menunjukkan persentase laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021. Dapat dilihat pada gambar diatas yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Kedungsepur dari tahun ke tahun menunjukkan naik turun (fluktuatif) namun cenderung meningkat. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Kedungsepur rata-rata diatas Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menekan atau mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Hal ini seperti pada teori hukum okun's yang mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, dimana apabila ekonomi tumbuh 2,5 persen maka akan menurunkan pengangguran sebesar 1 persen. Selain itu diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2022) yang menyatakan sama yaitu terdapat hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terdapat pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat pengangguran akan turun begitupun sebaliknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Palindangan dan Bakar (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pasti dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sendiri menurut Adam Smith merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Hal ini diperkuat oleh Mulyadi (2003) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang meningkat akan membawa jumlah angkatan kerja yang makin besar pula sehingga tingkat pengangguran akan meningkat.

Pengertian penduduk menurut BPS yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.



Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021
Sumber: BPS Jawa Tengah (2023), diolah.

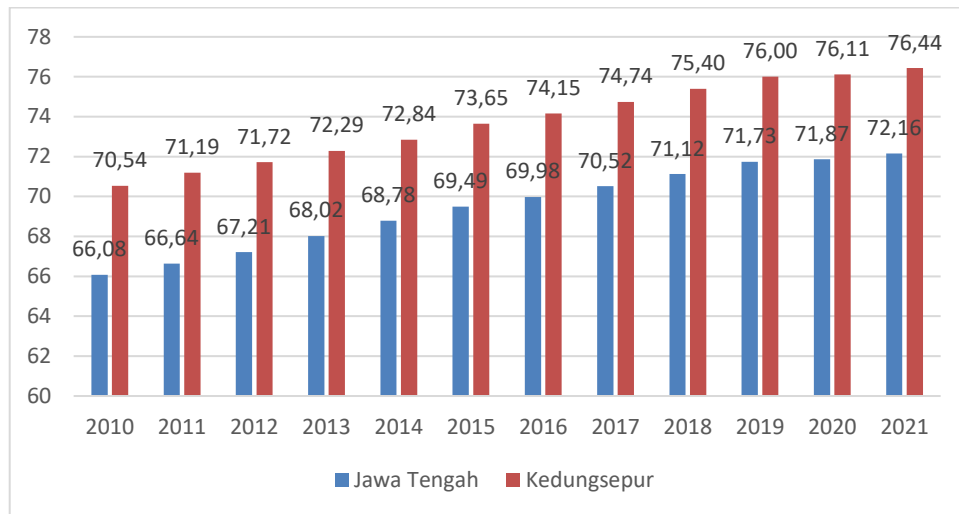
Gambar 1.4 menunjukkan jumlah penduduk di kawasan Kedungsepur tahun 2010-2021. Dilihat pada gambar diatas yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk di kawasan Kedungsepur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kota Semarang menjadi daerah dengan penduduk terbanyak atau terpadat pada wilayah Kedungsepur dengan jumlah 1.65 juta jiwa pada tahun 2021. Daerah dengan penduduk terkecil pada tahun 2021 yaitu Kota Salatiga yang hanya memiliki penduduk 192 ribu jiwa.

Tingginya jumlah penduduk yang ada di kawasan Kedungsepur akan meningkatkan pula jumlah angkatan kerja sehingga akan meningkatkan pengangguran jika tidak dibarengi dengan jumlah kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Muminin & Hidayat (2017) serta Priastiwi & Handayani (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran.

Namun hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Palindangan & Bakar (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh atau memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, tingkat Indeks pembangunan manusia juga berpengaruh pada tingkat pengangguran. Seperti halnya pada penelitian oleh Nurcholis (2014) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) sangat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marlina (2022) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Menurut BPS, indeks pembangunan manusia adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq pada tahun 1990 oleh *UNDP (United nation development program)* dan secara teratur ditampilkan dalam *human development report* (Laporan pembangunan manusia tahunan). Indeks pembangunan manusia digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam kualitas hidup manusia serta apakah seseorang dapat mencapai pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan dan pendidikan.



Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021

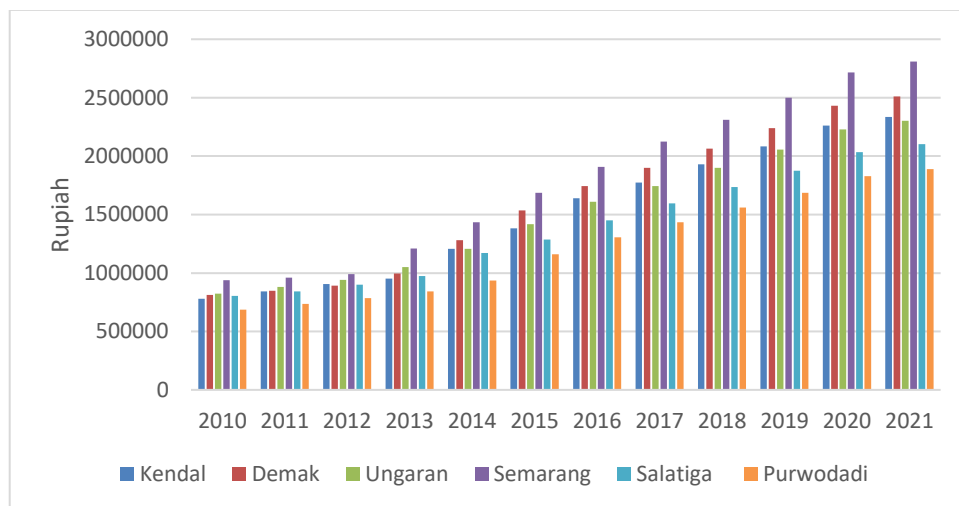
Sumber: BPS Jawa Tengah (2023), diolah.

Gambar 1.5 menunjukkan indeks pembangunan manusia yang ada di Kawasan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021. Dapat dilihat pada gambar diatas yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia di Kawasan Kedungsepur dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Selain itu indeks pembangunan manusia di kawasan Kedungsepur rata-rata diatas Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya dengan peningkatan indeks pembangunan manusia akan menekan atau mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Selain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh upah. Bagi perusahaan, tingkat upah yang tinggi akan menimbulkan banyak biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan akhirnya mengurangi jumlah tenaga kerja (Kuntiarti, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Pramudjasi. et al., (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara upah dengan pengangguran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Nurcholis (2014) yang menyatakan pengaruh upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak negatif terhadap pengangguran.

Hubungan upah dan pengangguran yang berpengaruh negatif bermakna bahwa apabila upah minimum naik maka akan menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring & Sasongko (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif upah minimum dengan pengangguran.



Gambar 1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021

Sumber: BPS Jawa Tengah (2023), diolah.

Gambar 1.6 menunjukkan upah minimum kabupaten/kota di kawasan Kedungsepur tahun 2010-2021. Dilihat pada gambar diatas yang ditunjukkan oleh upah minimum kabupaten/kota di kawasan Kedungsepur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Upah minimum tertinggi pada tahun 2021 berada di Kota Semarang yaitu sebesar Rp2.810.025. Adapun upah minimum terkecil di Kabupaten Grobogan (Purwodadi) yaitu sebesar Rp1.890.000. Peningkatan upah minimum setiap tahun seharusnya juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Ketidakseimbangan kenaikan upah yang tidak dapat

mengurangi pengangguranlah yang menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukan perlunya suatu penelitian yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan Kedungsepur. Problematika atau permasalahan mengenai pengangguran merupakan isu yang menarik dan sangat kompleks untuk diteliti karena pengangguran perlu diperhatikan mengingat dampaknya sangat luas bagi perekonomian. Maka dari itu peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai bahan skripsi dengan judul *“ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KAWASAN KEDUNGSEPUR TAHUN 2010-2021”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021?
4. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021
4. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur tahun 2010 – 2021

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai tambahan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.
- b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur.
- b. Bagi Swasta, penelitian ini diharapkan dapat informasi dan data mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur.

- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di kawasan Kedungsepur.